



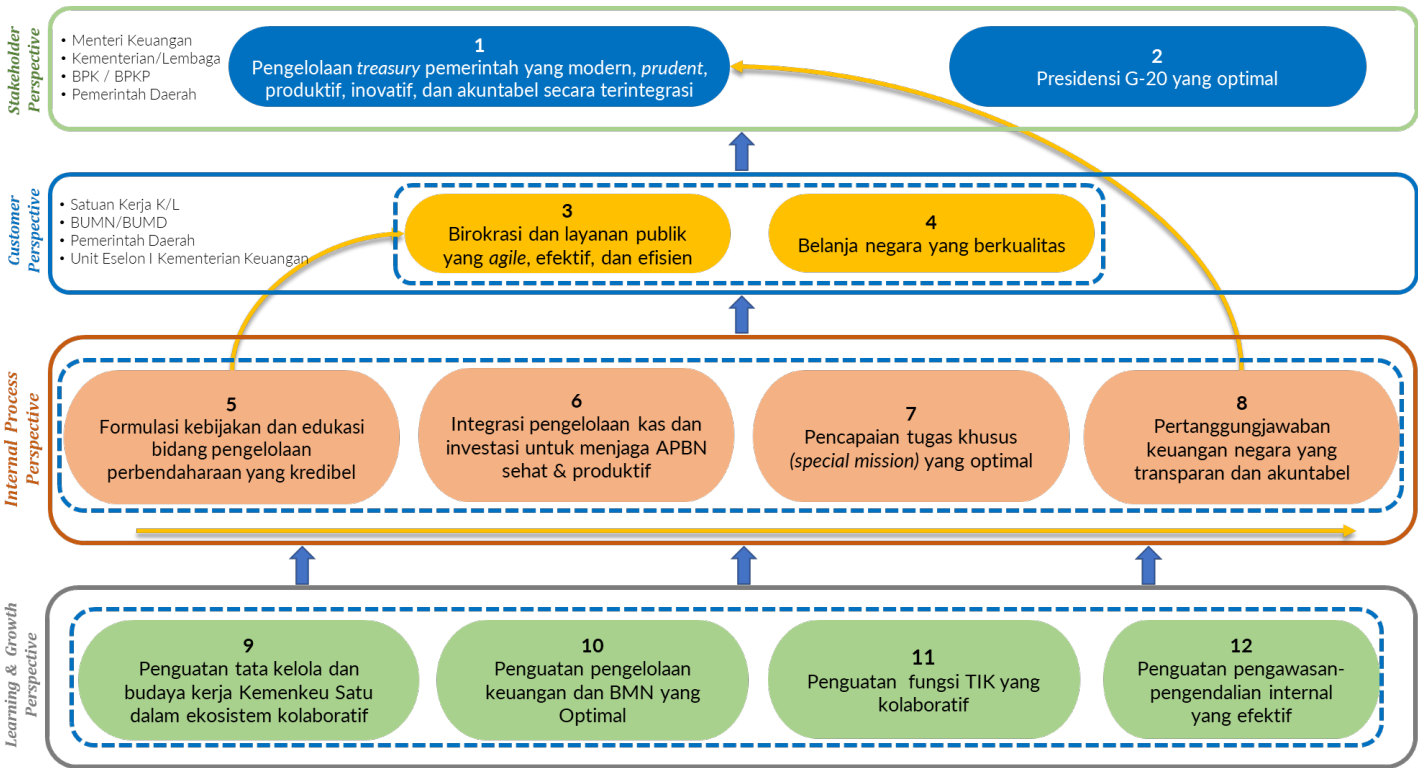
KONTRAK KINERJA
NOMOR: 5/KK/2022
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, saya akan:

- 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
- 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
- 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1 (skala 4)
		1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	4 (WTP)
		1c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)
2	Presidensi G-20 yang optimal	2a-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,59 (skala 5)
		3b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25 (skala 4)
4	Belanja negara yang berkualitas	4a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		4b-N	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
5	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		5b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
6	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif	6a-CP	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
		6b-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	100
		6c-N	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1 (skala 4)
7	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
		7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%
		7c-N	Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i>	80%
8	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%
		8b-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%
9	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
		9b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	92%
		9c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	83,5
		9c2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100
10	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100
		10a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		10a2-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		10a3-CP	Persentase implementasi <i>back office</i> terintegrasi	100%
		10a4-CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80
		10b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25%
11	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		11a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%
		11a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%
		11a3-CP	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i>	100
12	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	12a-CP	Indeks integritas organisasi	97,69
		12a1-CP	Indeks Integritas	95,38
		12a2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM	100%

Kegiatan		Anggaran	
1	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp.	74.241.856.000
	a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.	728.824.000
	b. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp.	2.356.557.000
	c. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	Rp.	3.464.470.000
	d. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp.	35.328.000
	e. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp.	105.430.000
	f. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.	42.777.297.000
	g. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp.	11.555.937.000
	h. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	Rp.	1.165.614.000
	i. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp.	3.706.155.000
	j. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp.	8.346.244.000
2	Dukungan Manajemen	Rp.	7.254.846.023.000



a. Legislasi dan Litigasi	Rp.	123.664.000
b. Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>)	Rp.	5.779.170.766.000
c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	453.654.539.000
d. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp.	2.794.240.000
e. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	632.701.167.000
f. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.	2.363.972.000
g. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	284.037.675.000
h. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	25.468.225.000
i. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	71.297.027.000
j. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.	1.795.288.000
k. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	1.439.460.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Hadiyanto

**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi							
1a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1 (skala 4)
1b-CP	Indeks opini BPK atas LKPP	-	4	4	-	4	-	4 (WTP)
1c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	-	4	4	-	4	4	4 (skala 5)
2	Presidensi G-20 yang optimal							
2a-CP	Persentase <i>communiqué</i> G20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	-	70%	70%	70%	70%	70%
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien							
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4,59	4,59 (skala 5)
3b-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	-	-	-	-	-	3,25	3,25 (skala 4)
4	Belanja negara yang berkualitas							
4a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89	89	89	89	89	89
4a-N	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	90	90	90	90	90	90
5	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel							
5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	-	-	-	-	-	100	100
5b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	-	88,5	88,5	-	88,5	88,5	88,5
6	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif							
6a-CP	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	30%	30%	-	30%	80%	80%
6b-CP	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	-	50	50	-	50	100	100



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6c-N	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1 (skala 4)
7	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal							
7a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	15%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
7c-N	Persentase BLU yang mengimplementasikan <i>Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation</i>	-	30%	30%	-	30%	80%	80%
8	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	89,5%	89,5%
8b-N	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	-	93%	93%	-	93%	-	93%
9	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
9c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	-	-	-	-	-	91,75	91,75
9c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	-	-	-	-	-	83,5	83,5
9c2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	-	20	20	-	20	100	100
10	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
10a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	68	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
10a2-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
10a3-CP	Persentase implementasi <i>back office</i> terintegrasi	-	40%	40%	-	40%	100%	100%



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10a4-CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	-	30	30	-	30	80	80
10b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama	-	-	-	-	-	25%	25%
11	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif							
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
11a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
11a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	90%	90%
11a3-CP	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i>	-	100	100	-	100	100	100
12	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
12a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	97,69	97,69
12a1-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	95,38	95,38
12a2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Jakarta, 28 Januari 2022
Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hadiyanto



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Hadiyanto	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	196210101987031006	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	PANGKAT/GOL RUANG	-
JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,1
2	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	Indeks opini BPK atas LKPP	4
3	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4
4	Presidensi G-20 yang optimal	Persentase communique G20 usulan Indonesia yang disepakati	70
5	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,59
6	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25
7	Belanja negara yang berkualitas	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
8	Belanja negara yang berkualitas	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
9	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
10	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
11	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80
12	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif	Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan	100
13	Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif	Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,1
14	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100
15	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100



NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
16	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	Persentase BLU yang mengimplementasikan Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation	80
17	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5
18	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93
19	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100
20	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92
21	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75
22	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100
23	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Tingkat penggunaan aset bersama	25
24	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
25	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks integritas organisasi	97,69

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hadiyanto
NIP 196210101987031006

Jakarta, 28 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

